



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN SINGKAT**

**RAPAT DENGAR PENDAPAT PANJA STANDAR NASIONAL DIKDASMEN
KOMISI X DPR RI
(BIDANG: PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA,
PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, RISTEK DIKTI, DAN PERPUSNAS)**

Tahun Sidang	:	2017 - 2018.
Masa Persidangan ke	:	IV (Tiga).
Sifat Rapat	:	Terbuka
Jenis Rapat	:	Rapat Dengar Pendapat
Dengan	:	1. Dirjen Dikdasmen Kemendikbud RI 2. Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu RI 3. Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri RI 4. Dirjen Otda dan Bina Keuangan Daerah Kemendagri RI 5. Deputi SDM Aparatur Kemenpan RB RI 6. Deputi Pengembangan SDM, Masyarakat dan Kebudayaan Bappenas RI 7. Sekjen Kemenkominfo RI
Hari/Tanggal	:	Selasa, 13 Maret 2018.
Pukul	:	10.00 WIB s/d selesai.
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi X DPR RI.
Pimpinan Rapat	:	Dr. Abdul Fikri Faqih, M.M./Ketua Panja/Wakil Ketua Komisi X DPR RI.
Sekretaris Rapat	:	Sarilan Putri Khairunnisa, S.Sos /Kabagset Komisi X DPR RI.
Acara	:	1. Perencanaan Pembangunan Pendidikan menuju SN Dikdasmen 2. Kebijakan K/L dalam memenuhi SN Dikdasmen 3. Pola Koordinasi antar K/L dalam Pembangunan Pendidikan menuju SN Dikdasmen 4. Program dan Kegiatan K/L dalam Memenuhi SN Dikdasmen 5. Capaian dan Permasalahan SN Dikdasmen 6. Masukan dan usulan terkait Permasalahan SN Dikdasmen.
Hadir	:	25 orang dari 31 Anggota Panja Standar Nasional Dikdasmen Komisi X DPR-RI.
Hadir dari Pemerintah	:	1. Dr. Hamid Muhammad (Dirjen Dikdasmen Kemendikbud RI) 2. Putut Hari Satyaka (Direktur Dana Perimbangan Kemenkeu RI) 3. Ir. Diah Indrajati, M.Sc (Plt. Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri RI)

4. Muhammad Ardian (Direktur Fasilitas Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah Kemendagri RI)
5. Setiawan Wangsaatmaja (Deputi Bidang SDM Aparatur Kemenpan-RB RI)
6. Gati Gayatri (Kapusbang Literasi dan Profesi SDM Komunikasi Kemenkominfo RI)
7. DR. Hidayat (Direktur Pendidikan dan Agama Bappenas RI)

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Panja Standar Nasional Dikdasmen Komisi X DPR RI dengan Dirjen Dikdasmen Kemendikbud RI, Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah Kemenkeu RI, Dirjen Otda dan Bina Keuangan Daerah Kemendagri RI, Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri RI Deputi Pengembangan SDM, Masyarakat, dan Kebudayaan Bappenas RI, Deputi SDM Aparatur Kemenpan RB RI, dan Sekjen Kementerian Kominfo RI dibuka pada pukul 10.30 WIB oleh Dr. H. Abdul Fikri Faqih, M.M./Ketua Panja/Wakil Ketua Komisi X DPR RI, setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam Pasal 251 ayat (1) dan Pasal 246 ayat (1) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib dan Rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan dari masing-masing pejabat eselon 1 serta menampung pertanyaan dan saran dari Anggota Panja Standar Nasional Dikdasmen Komisi X DPR RI.

II. KESIMPULAN

A. Rapat Dengar Pendapat Panja SN Dikdasmen Komisi X DPR RI menghadirkan dan mendengarkan penjelasan dari Dirjen Dikdasmen Kemendikbud RI, Plt. Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri RI, dan Deputi Bidang SDM Aparatur Kemenpan-RB RI. *(bahan paparan terlampir)*

B. Permasalahan Pendidikan Dasar dan Menengah yang segera membutuhkan penyelesaian antara lain sebagai berikut :

1. Kekurangan guru PNS berdasarkan Dapodik sejumlah 707.324 orang, jika menggunakan pendekatan *multi subject* dan *multi-grade teaching* dan mengajar 30 jam.
2. Guru menjelang pensiun sejumlah 256.950 orang untuk tahun 2018-2021 (rincian data dari Kemendikbud RI terlampir)
3. Kekurangan Sarpras Pendidikan, dengan rincian sebagai berikut:

Kebutuhan per 31 Desember 2017	Jumlah
Rehab berat	136.909
Rehab sedang	108.994
RKB	134.318
USB	541
Perpustakaan	67.889
Lab IPA	18.768

4. Merger gedung sekolah
 5. Permasalahan Dana Alokasi Pendidikan.
- C. Terhadap permasalahan di atas, pejabat eselon 1 memberikan tanggapan antara lain sebagai berikut:

Dirjen Dikdasmen Kemendikbud RI.

Mengharapkan perlunya solusi yang melibatkan lintas K/L atas permasalahan guru, sarpras pendidikan dan DAK Pendidikan.

Plt. Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri RI,

1. Kemendagri RI telah mengeluarkan Permendagri No. 117 Tentang Tata Cara Pengusulan dan Verifikasi usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah melalui dana Alokasi DAK Fisik. Permendagri ini dimaksudkan sebagai upaya untuk mengoptimalkan kualitas usulan DAK yang disampaikan daerah serta dukungannya terhadap prioritas nasional dan prioritas daerah. Adapun tujuannya yaitu untuk memandu daerah dalam melakukan verifikasi rancangan usulan DAK dan memandu proses sinkronisasi usulan kegiatan DAK.
2. Dalam rangka pencapaian target pembangunan nasional, Kemendagri RI memfasilitasi pemerintah daerah dan kementerian (koordinasi teknis), termasuk dalam hal membahas Dana Alokasi Khusus (DAK).
3. Terkait permasalahan siswa yang orang tua siswanya tidak memiliki identitas, akan kami tindakjuti dengan mengirimkan datanya kepada Ditjen Dukcapil Kemendagri RI.

Deputi Bidang SDM Aparatur Kemenpan-RB RI.


1. Mengenai pengusulan kebutuhan guru, Kemenpan RB RI ingin mengetahui secara benar kebutuhan yang ada, karena isu yang berkembang yaitu terkait redistribusi.
 2. Kemenpan RB RI saat ini sedang memverifikasi dan menyandingkan kebutuhan guru yang diajukan oleh pemerintah daerah dan data yang dimiliki Kemendikbud RI.
 3. Telah dilakukan rekrutmen CPNS sejak tahun 2013 sampai dengan 2017 untuk tenaga pendidik, yaitu :
Tahun 2013 = 108.109 tenaga pendidik (*direkrut dari tenaga honorer K2*)
Tahun 2014/2015 = 798 Guru Garis Depan tahap I
Tahun 2016/2017 = 6.296 Guru Garis Depan tahap II
 4. Mengenai rencana rekrutmen CPNS tahun 2018, saat ini sedang dalam proses verifikasi dan validasi untuk memastikan usulan seluruh instansi pemerintah (Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota).
 5. Mengenai tenaga honorer sudah ditindaklanjuti dengan dikeluarkan 2 (dua) PP, yaitu PP No. 48 Tahun 2015 dan PP Nomor 56 Tahun 2012.
- D. Panja Standar Nasional Dikdasmen Komisi X DPR RI memberikan catatan dan pandangan sebagai berikut:
1. Pemerintah agar segera mencabut Moratorium pengangkatan guru.

2. Kemendikbud RI untuk melakukan merger sekolah terhadap satuan pendidikan yang memiliki jumlah siswa sangat terbatas dan jarak sekolah tidak jauh.
 3. Kemendikbud RI segera mereview Data Pokok Pendidikan, agar sesuai dengan kondisi di daerah.
 4. Meminta kepada Kemendikbud RI, Kemenpan-RB RI dan Kemendagri RI untuk melakukan kajian tentang guru secara komprehensif yang meliputi antara lain: sebaran, jumlah, guru mapel, dan guru produktif.
 5. Pemerintah segera membangun sistem pembinaan karir pendidik.
- E. Panja SN Dikdasmen Komisi X DPR RI dan Dirjen Dikdasmen Kemendikbud RI, Plt. Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri RI, dan Deputi Bidang SDM Aparatur Kemenpan-RB RI menyepakati:
1. Kemendikbud akan mereview Data Pokok Pendidikan
 2. Melakukan kajian tentang guru secara komprehensif yang meliputi antara lain: sebaran, jumlah, guru mapel, dan guru produktif.
 3. Melakukan penyelesaian sisa guru honorer K2 yang tidak lulus seleksi tahun 2013, paling lama tahun 2018-2019 sesuai peraturan perundang-undangan.
- F. Panja Standar Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah (SN Dikdasmen) Komisi X DPR RI memberikan apresiasi atas paparan dan penjelasan terkait tugas pokok dan fungsi masing-masing kementerian dan lembaga dalam mendukung capaian Standar Nasional Pendidikan di daerah. Namun terkait hal tersebut, berdasarkan Tata Tertib DPR RI Pasal 244 bahwa Rapat Dengar Pendapat harus dihadiri oleh Pejabat Pemerintah setingkat eselon I, maka Panja memandang perlu untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat kembali pada Masa Sidang IV Tahun Sidang 2017-2018 dengan Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu RI, Deputi Pengembangan SDM, Masyarakat dan Kebudayaan Bappenas RI, dan Pejabat Eselon 1 Kemenkominfo RI.
- G. Panja Standar Nasional Dikdasmen Komisi X DPR RI sepakat untuk menghadirkan Pejabat eselon II dari Kemenpan RB RI, Kemendagri RI, dan Kemendikbud RI untuk mendampingi RDPU Panja SN Dikdasmen Komisi X DPR RI dengan lembaga profesi guru pada tanggal 14 maret 2018 pukul 10.00 WIB.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 14.56 WIB

KETUA RAPAT,



DR. H. Abdul Fikri Faqih, M.M.